

ANALISIS EFEKTIVITAS PROGRAM ALOKASI DANA DESA PADA PEMBERDAYAAN EKONOMI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM STUDI PADA KECAMATAN SUMBEREJO KABUPATEN TANGGAMUS

Jumiyati¹, Lisa Efrina², Ahmad Sayuti³

Universitas Islam An Nur Lampung

Email: Vivorafa787@gmail.com

Abstract

The village fund allocation program is one of the government's strategies to promote development and economic empowerment in rural communities. This study aims to analyze the effectiveness of the village fund allocation program in empowering the local economy in Sumberejo District, Tanggamus Regency, from the perspective of Islamic economics. The research employs a descriptive qualitative approach, with data collection techniques including observation, in-depth interviews, and document analysis. The findings indicate that the program has had a positive impact on improving the economic capacity of the community, particularly through micro-enterprise activities, skills training, and the strengthening of village economic institutions. However, the program's implementation still faces various challenges, such as limited community participation, suboptimal transparency, and the weak integration of Islamic values in the planning and implementation processes. From the perspective of Islamic economics, the program is considered effective if it fulfills the principles of distributive justice, sustainable empowerment, and does not create social inequality. Therefore, a participatory, transparent, and sharia-based governance system—grounded in the principles of *amanah* (trust), *maslahah* (public benefit), and *justice*—is necessary to ensure equitable and blessed economic empowerment for all layers of the village community.

Keywords: Village fund, economic empowerment, effectiveness, Islamic economics, Sumberejo, distributive justice.

Abstrak

Program alokasi dana desa merupakan salah satu strategi pemerintah dalam mendorong pembangunan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas program alokasi dana desa terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Tanggamus, ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program alokasi dana desa telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat, khususnya melalui kegiatan usaha mikro, pelatihan keterampilan, dan penguatan kelembagaan ekonomi desa. Namun demikian, efektivitas pelaksanaan program masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya partisipasi masyarakat, transparansi yang belum optimal, serta lemahnya integrasi nilai-nilai Islam dalam

perencanaan dan implementasi program. Dalam perspektif ekonomi Islam, program ini dinilai efektif apabila mampu mewujudkan prinsip keadilan distributif, pemberdayaan yang berkelanjutan, dan tidak menimbulkan ketimpangan sosial. Oleh karena itu, dibutuhkan tata kelola dana desa yang partisipatif, transparan, dan berbasis pada prinsip-prinsip syariah, seperti amanah, maslahat, dan keadilan, guna menjamin tercapainya pemberdayaan ekonomi yang berkah dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat desa.

Kata kunci: Dana desa, pemberdayaan ekonomi, efektivitas, ekonomi Islam, Sumberejo, keadilan distributif.

Pendahuluan

Program alokasi dana desa merupakan salah satu bentuk intervensi kebijakan fiskal yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan di wilayah pedesaan dan mengurangi ketimpangan antara desa dan kota. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah pusat melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi secara rutin mengalokasikan dana dalam jumlah signifikan kepada setiap desa di seluruh Indonesia. Dana tersebut diharapkan mampu digunakan secara mandiri oleh pemerintah desa untuk membiayai berbagai program pembangunan, termasuk dalam aspek pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Dengan karakteristik wilayah pedesaan yang didominasi oleh sektor pertanian dan usaha mikro, keberadaan dana desa membuka peluang besar bagi penguatan ekonomi lokal dan peningkatan taraf hidup masyarakat (Sugianti et al., 2019).

Kecamatan Sumberejo di Kabupaten Tanggamus merupakan salah satu wilayah yang merasakan dampak langsung dari kebijakan alokasi dana desa. Dengan mayoritas penduduk yang berprofesi sebagai petani dan pelaku usaha kecil, kecamatan ini memiliki potensi ekonomi yang besar namun belum sepenuhnya tergarap secara optimal. Dana desa, bila dimanfaatkan secara efektif, seharusnya mampu menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal. Namun, dalam praktiknya, banyak program pemberdayaan ekonomi yang belum menunjukkan hasil yang signifikan atau berkelanjutan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang efektivitas penggunaan dana desa dalam mencapai tujuan pemberdayaan ekonomi, serta bagaimana kesesuaiannya dengan nilai-nilai dalam ekonomi Islam yang menekankan pada prinsip keadilan, keberkahan, dan kesejahteraan bersama.

Efektivitas program dana desa tidak hanya dapat diukur dari sisi output pembangunan fisik, tetapi juga dari seberapa jauh program tersebut mampu memberdayakan masyarakat secara

ekonomi (Ekasari, 2020). Pemberdayaan ekonomi mencakup aspek peningkatan keterampilan, penyediaan modal usaha, pembentukan kelembagaan ekonomi, serta penciptaan lapangan kerja yang layak (Darwis & Rusastra, 2011). Dalam konteks ini, keberhasilan program sangat tergantung pada partisipasi masyarakat, transparansi pengelolaan dana, serta adanya perencanaan yang tepat sasaran dan berbasis kebutuhan riil masyarakat desa. Ketika pendekatan pembangunan tidak melibatkan masyarakat secara aktif, maka besar kemungkinan program-program tersebut hanya menjadi formalitas administratif tanpa memberikan perubahan substansial dalam kehidupan ekonomi warga desa.

Perspektif ekonomi Islam memberikan dimensi tambahan yang sangat penting dalam menilai keberhasilan suatu program pembangunan, termasuk alokasi dana desa (USWATUN, 2024). Ekonomi Islam tidak hanya berbicara tentang pertumbuhan dan efisiensi, tetapi juga menekankan aspek spiritualitas, keadilan sosial, dan distribusi kekayaan yang merata. Prinsip-prinsip seperti *maqashid syariah*, *maslahah*, *amanah*, dan *keadilan* merupakan indikator penting dalam menilai apakah suatu kebijakan benar-benar sesuai dengan semangat Islam (Seto et al., 2023). Dalam konteks program dana desa, penerapan prinsip-prinsip ini dapat terlihat dari bagaimana dana tersebut dikelola secara transparan, dimanfaatkan untuk kebutuhan produktif, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil tanpa adanya praktik korupsi, nepotisme, atau eksploitasi (Saggaf et al., 2018).

Salah satu tantangan besar dalam pelaksanaan program dana desa di Kecamatan Sumberejo adalah masih lemahnya integrasi antara kebijakan pembangunan ekonomi dan nilai-nilai Islam yang seharusnya menjadi pedoman masyarakat mayoritas Muslim. Banyak program pemberdayaan ekonomi yang dijalankan tanpa kerangka normatif yang jelas, sehingga tidak memperhatikan etika bisnis Islami seperti kejujuran, keadilan, dan larangan terhadap praktik ribawi. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dalam perencanaan dan pelaksanaan program, yakni pendekatan yang tidak hanya teknokratis, tetapi juga spiritual dan etis. Dengan demikian, dana desa dapat menjadi instrumen pembangunan yang tidak hanya efektif secara material, tetapi juga bernilai secara moral dan religius.

Fenomena penyalahgunaan dana desa yang kerap diberitakan juga menjadi sorotan penting dalam diskursus efektivitas program ini. Kasus-kasus korupsi yang melibatkan oknum perangkat

desa menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan serius dalam sistem pengawasan dan akuntabilitas. Padahal, dalam Islam, pengelolaan harta umat harus dijalankan secara amanah dan bertanggung jawab, serta diawasi dengan prinsip hisbah sebagai bentuk kontrol sosial (Tamsir et al., n.d.). Oleh karena itu, efektivitas program dana desa juga sangat dipengaruhi oleh integritas moral para pengelola dana, serta adanya sistem tata kelola yang menjamin transparansi dan partisipasi publik dalam setiap tahapan pelaksanaan program.

Pemberdayaan ekonomi dalam konteks desa seharusnya diarahkan pada kemandirian masyarakat dalam mengelola sumber daya lokal untuk menciptakan nilai tambah (Margayaningsih, 2016). Dalam perspektif ekonomi Islam, hal ini dapat diwujudkan melalui penguatan lembaga-lembaga ekonomi berbasis komunitas, seperti koperasi syariah, kelompok usaha tani, dan usaha mikro yang bebas dari riba dan spekulasi (YANTI, 2019). Jika program dana desa diarahkan untuk mendukung inisiatif-inisiatif seperti ini, maka akan tercipta ekosistem ekonomi desa yang tidak hanya produktif, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan kata lain, dana desa dapat menjadi alat transformasi sosial dan ekonomi yang membawa perubahan menuju masyarakat yang lebih mandiri, adil, dan religius.

Urgensi dari penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk mengkaji secara lebih mendalam sejauh mana program alokasi dana desa telah efektif dalam memberdayakan ekonomi masyarakat di Kecamatan Sumberejo, serta bagaimana pelaksanaannya mencerminkan nilai-nilai Islam. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menggambarkan kondisi objektif di lapangan, tetapi juga memberikan analisis kritis berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang relevan dengan konteks masyarakat desa. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah, perangkat desa, dan masyarakat dalam merancang program yang lebih efektif, akuntabel, dan Islami di masa depan.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur mengenai implementasi kebijakan dana desa dalam kerangka ekonomi Islam, yang selama ini masih relatif sedikit dikaji secara ilmiah. Dengan memadukan pendekatan empiris dan normatif, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan konsep pemberdayaan ekonomi desa yang berkeadilan dan berkelanjutan. Dalam jangka panjang, konsep ini diharapkan dapat mendorong

lahirnya model pembangunan desa Islami yang tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada transformasi sosial dan spiritual masyarakat.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini akan mengkaji efektivitas program alokasi dana desa dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Kecamatan Sumberejo, serta menganalisisnya dalam perspektif ekonomi Islam. Fokus utama akan diarahkan pada sejauh mana dana desa digunakan secara optimal untuk kegiatan produktif, bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, serta apakah nilai-nilai Islam seperti keadilan, keberkahan, dan amanah telah tercermin dalam proses perencanaan hingga implementasi program. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan formulasi kebijakan yang mampu mengintegrasikan efisiensi ekonomi dan etika keislaman dalam pengelolaan dana desa.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang efektivitas program alokasi dana desa dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta bagaimana kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Pendekatan kualitatif dipilih karena dinilai mampu mengungkap secara rinci realitas sosial, praktik lapangan, serta pandangan masyarakat terhadap implementasi program dana desa (Sugiyono, 2010). Fokus utama penelitian ini adalah pada pengalaman, persepsi, serta interaksi sosial antara pelaku kebijakan desa dan masyarakat penerima manfaat, yang tidak dapat dijelaskan secara angka melainkan melalui deskripsi yang utuh dan kontekstual. Penelitian ini tidak berfokus pada generalisasi, melainkan pada pemahaman mendalam terhadap suatu kasus spesifik, yaitu Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa metode, yaitu observasi lapangan, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Observasi dilakukan secara langsung di beberapa desa di Kecamatan Sumberejo yang menerima dana desa dalam jumlah besar dan mengalokasikannya pada kegiatan pemberdayaan ekonomi, seperti pelatihan usaha kecil, bantuan modal produktif, dan pembangunan infrastruktur ekonomi masyarakat. Wawancara dilakukan terhadap berbagai informan kunci, antara lain kepala desa, perangkat desa, pengurus BUMDes, pelaku usaha lokal, serta tokoh agama yang memahami prinsip-prinsip ekonomi Islam. Sedangkan studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah dokumen perencanaan dan pelaporan penggunaan

dana desa, serta regulasi yang berlaku baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, untuk menemukan pola, makna, serta kesesuaian antara pelaksanaan program dan prinsip ekonomi Islam.

Untuk menjamin validitas data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan metode, di mana data dari wawancara divalidasi melalui observasi dan dokumentasi. Selain itu, dilakukan pengecekan silang antar informan guna memastikan keakuratan informasi. Analisis data dilakukan secara induktif, yakni menyusun temuan berdasarkan fakta lapangan dan menarik kesimpulan dari data yang berkembang selama proses penelitian. Peneliti juga menerapkan prinsip *member checking* dengan mengonfirmasi hasil sementara kepada narasumber utama untuk memperoleh masukan dan koreksi. Dengan pendekatan dan teknik yang digunakan ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang akurat, objektif, dan berlandaskan nilai-nilai Islam mengenai efektivitas program dana desa dalam memberdayakan ekonomi masyarakat di Kecamatan Sumberejo.

Hasil dan Pembahasan

Efektivitas Program Dana Desa dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pelaksanaan program alokasi dana desa di Kecamatan Sumberejo secara umum telah menunjukkan langkah-langkah positif dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Beberapa desa telah menggunakan sebagian besar dana tersebut untuk kegiatan produktif yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung peningkatan taraf hidup masyarakat, seperti pelatihan keterampilan, bantuan alat usaha, dan penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Misalnya, di Desa Sinar Semendo, dana desa dialokasikan untuk pelatihan pengolahan hasil pertanian dan perikanan lokal. Hal ini memberikan dampak terhadap terbukanya peluang usaha kecil yang berbasis rumah tangga, khususnya bagi kelompok ibu rumah tangga dan pemuda. Meski skalanya masih terbatas, namun sudah terdapat indikasi bahwa masyarakat mulai memiliki kemandirian secara ekonomi.

Namun demikian, tidak semua desa di Kecamatan Sumberejo memanfaatkan dana desa secara maksimal untuk tujuan pemberdayaan ekonomi. Masih ditemukan kecenderungan untuk mengalokasikan dana lebih banyak pada pembangunan fisik seperti jalan lingkungan, talut, dan

drainase, yang memang penting, tetapi tidak berdampak langsung pada peningkatan pendapatan masyarakat. Selain itu, sebagian kegiatan ekonomi yang dibiayai dari dana desa belum dirancang dengan pendekatan bisnis berkelanjutan, sehingga kegiatan tersebut berhenti setelah dana habis. Misalnya, bantuan modal usaha yang tidak dibarengi dengan pendampingan dan evaluasi usaha menyebabkan banyak pelaku usaha kesulitan mempertahankan keberlangsungan usahanya dalam jangka panjang.

Aspek partisipasi masyarakat juga menjadi faktor penting dalam menilai efektivitas program. Dalam banyak kasus, masyarakat hanya dilibatkan dalam musyawarah desa secara formal, tetapi tidak memiliki ruang yang cukup dalam perumusan program dan pengawasan pelaksanaan. Hal ini mengakibatkan kurangnya rasa memiliki terhadap program yang dilaksanakan. Menurut pandangan ekonomi Islam, partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan harta publik seperti dana desa merupakan bagian dari prinsip *syura* (musyawarah) dan tanggung jawab sosial (*mas'uliyah*). Ketika prinsip ini tidak dijalankan dengan baik, maka program akan kehilangan ruh pemberdayaannya dan hanya bersifat top-down.

Selain partisipasi, akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa juga menjadi persoalan yang mencolok. Ditemukan beberapa desa yang tidak mempublikasikan penggunaan dana secara terbuka kepada masyarakat, sehingga menimbulkan kecurigaan dan ketidakpercayaan publik. Dalam perspektif ekonomi Islam, transparansi merupakan bagian dari amanah yang harus dijaga, terutama dalam pengelolaan harta umat. Ketika prinsip amanah tidak ditegakkan, maka akan timbul potensi penyimpangan yang merugikan masyarakat. Oleh karena itu, efektivitas program tidak hanya ditentukan oleh output kegiatan, tetapi juga oleh tata kelola dan etika pelaksanaannya.

Sebagian besar pelaku usaha mikro yang menerima bantuan dari program dana desa mengaku bahwa bantuan tersebut sangat membantu dalam memulai usaha, namun kurang bermanfaat dalam pengembangan usaha jangka panjang. Kurangnya akses terhadap pelatihan lanjutan, jaringan pasar, dan pembinaan usaha menjadi hambatan utama dalam menciptakan keberlanjutan usaha. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan program yang tidak sekadar memberi bantuan, tetapi juga membangun ekosistem kewirausahaan desa yang utuh. Ekonomi Islam memandang pentingnya pembangunan *human capital* (modal manusia) yang kuat sebagai

dasar keberhasilan ekonomi masyarakat, karena kekuatan ekonomi bukan hanya terletak pada modal materi, tetapi juga pada kapasitas dan akhlak pelaku usahanya.

Upaya pengembangan kelembagaan ekonomi desa, seperti BUMDes, menunjukkan hasil yang bervariasi. Beberapa BUMDes berhasil mengelola usaha seperti simpan pinjam, sewa alat pertanian, dan toko desa, namun ada pula yang hanya aktif di awal pendirian lalu mengalami stagnasi. Kurangnya kapasitas manajerial dan lemahnya tata kelola usaha menjadi penyebab utama. Dalam ekonomi Islam, kelembagaan ekonomi seharusnya dibangun berdasarkan nilai *ta'awun* (kerja sama) dan keadilan, serta dijalankan oleh orang-orang yang memiliki integritas dan kompetensi. BUMDes yang dikelola secara profesional dan transparan dapat menjadi pilar ekonomi desa yang adil dan berkelanjutan.

Secara umum, efektivitas program dana desa dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kecamatan Sumberejo masih perlu ditingkatkan melalui pendekatan yang lebih partisipatif, terarah, dan berbasis kebutuhan. Pemerintah desa memerlukan dukungan dalam bentuk peningkatan kapasitas perencanaan dan pengelolaan program, agar kegiatan pemberdayaan benar-benar menyentuh sasaran dan memiliki dampak jangka panjang. Tanpa itu, dana desa hanya akan menjadi pengeluaran rutin yang tidak menghasilkan transformasi ekonomi yang berarti. Pendekatan ekonomi Islam menawarkan panduan normatif yang dapat memperkuat efektivitas tersebut, dengan menjadikan nilai spiritual dan sosial sebagai landasan kebijakan pembangunan.

Dengan demikian, efektivitas program alokasi dana desa dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat baru akan tercapai secara utuh apabila ada sinergi antara aspek teknis, manajerial, dan spiritual. Program yang dirancang dengan melibatkan masyarakat, dikelola secara amanah dan profesional, serta diarahkan pada kemandirian ekonomi yang berkeadilan, akan memiliki potensi besar untuk mengangkat kesejahteraan desa. Konsep *barakah* dalam ekonomi Islam menjadi ukuran keberhasilan yang tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga mencakup nilai-nilai moral dan keberlanjutan sosial.

Integrasi Nilai-Nilai Ekonomi Islam dalam Implementasi Program Dana Desa

Implementasi nilai-nilai ekonomi Islam dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Sumberejo masih bersifat terbatas dan belum terintegrasi secara sistematis dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan program. Meskipun masyarakatnya mayoritas Muslim dan

memiliki kesadaran religius yang cukup tinggi, nilai-nilai ekonomi Islam seperti keadilan, amanah, dan kejujuran belum menjadi rujukan utama dalam mengelola program pembangunan desa. Hal ini bisa dilihat dari kurangnya inisiatif untuk membangun lembaga ekonomi syariah desa seperti koperasi syariah, unit zakat desa, atau sistem pembiayaan bebas riba. Akibatnya, banyak kegiatan ekonomi masyarakat yang masih bergantung pada praktik konvensional yang tidak selalu selaras dengan nilai-nilai Islam.

Salah satu aspek ekonomi Islam yang paling relevan dalam konteks pengelolaan dana desa adalah prinsip *keadilan distributif* (Ardha & Ismail, 2024). Prinsip ini menekankan bahwa alokasi dana harus merata dan mengutamakan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan, seperti fakir miskin, petani kecil, dan usaha mikro (Saripudin, 2021). Namun dalam realitas di lapangan, masih ditemukan dominasi elite desa dalam menentukan program prioritas, sehingga tidak semua kelompok masyarakat memperoleh manfaat yang setara. Ketimpangan akses terhadap program pemberdayaan ekonomi menjadi salah satu indikasi bahwa nilai keadilan belum sepenuhnya dijalankan. Dalam Islam, keadilan bukan hanya tujuan, tetapi juga sarana untuk menjaga harmoni sosial dan mencegah kecemburuan sosial yang dapat merusak struktur masyarakat (Jaelani, 2016).

Selain keadilan, nilai *amanah* atau tanggung jawab dalam mengelola dana publik menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana nilai ekonomi Islam diimplementasikan. Dalam konteks dana desa, amanah tercermin pada transparansi penggunaan anggaran, pelaporan yang jujur, dan tidak adanya penyalahgunaan wewenang. Sayangnya, kasus penyimpangan dana desa yang pernah terjadi di beberapa desa menunjukkan bahwa pelaksanaan amanah masih menjadi tantangan serius. Islam menegaskan bahwa siapa pun yang mengelola harta umat harus mempertanggungjawabkannya, tidak hanya kepada masyarakat, tetapi juga kepada Allah SWT. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan sistem kontrol sosial dan pendidikan moral bagi aparat desa.

Prinsip *maslahah* atau kemaslahatan umum juga menjadi acuan penting dalam ekonomi Islam. Penggunaan dana desa seharusnya diarahkan untuk kegiatan yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu. Misalnya, pembangunan fasilitas usaha bersama, infrastruktur pasar desa, atau pelatihan kewirausahaan berbasis lokal. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa beberapa program dana desa justru diarahkan untuk proyek yang

kurang relevan dengan kebutuhan masyarakat, karena lebih berorientasi pada pencitraan atau kepentingan politik. Hal ini bertentangan dengan prinsip masalah, karena mengabaikan nilai manfaat jangka panjang yang seharusnya menjadi prioritas dalam pembangunan.

Nilai *syura* atau musyawarah dalam pengambilan keputusan merupakan elemen penting dalam tata kelola berbasis Islam. Namun praktik musyawarah desa di Kecamatan Sumberejo seringkali hanya bersifat formalitas tanpa dialog substantif yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Padahal dalam ekonomi Islam, *syura* menjadi mekanisme demokratis yang menjamin keterwakilan dan kebijaksanaan dalam menetapkan kebijakan. Kurangnya keterlibatan tokoh agama, perempuan, dan pemuda dalam forum musyawarah menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan belum inklusif. Padahal, pelibatan semua unsur masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa program dana desa benar-benar mencerminkan aspirasi kolektif.

Salah satu peluang besar untuk memperkuat integrasi nilai ekonomi Islam dalam program dana desa adalah melalui pembentukan lembaga ekonomi Islam tingkat desa, seperti BMT (Baitul Maal wat Tamwil), koperasi syariah, atau unit zakat dan infak desa. Namun hingga saat ini, inisiatif semacam itu masih minim di Kecamatan Sumberejo. Padahal, keberadaan lembaga-lembaga tersebut tidak hanya akan memperkuat pemberdayaan ekonomi berbasis syariah, tetapi juga menciptakan ekosistem keuangan alternatif yang dapat mengurangi ketergantungan masyarakat pada rentenir atau lembaga pembiayaan konvensional. Peran tokoh agama dan penyuluh agama sangat penting dalam membimbing masyarakat menuju sistem ekonomi yang lebih etis dan Islami.

Pendidikan dan literasi ekonomi Islam juga perlu ditingkatkan, baik bagi aparat desa maupun masyarakat umum. Rendahnya pemahaman terhadap prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam menjadi salah satu penghambat utama dalam proses integrasi nilai-nilai tersebut dalam kebijakan pembangunan. Pelatihan-pelatihan berbasis ekonomi Islam dapat menjadi strategi untuk meningkatkan kesadaran kolektif dan kompetensi teknis dalam mengelola dana desa sesuai prinsip syariah. Ketika pemahaman ini meningkat, maka akan tumbuh kesadaran untuk menjalankan pembangunan yang tidak hanya mengedepankan angka, tetapi juga nilai dan keberkahan.

Secara keseluruhan, integrasi nilai-nilai ekonomi Islam dalam program dana desa di Kecamatan Sumberejo masih bersifat potensial namun belum optimal. Diperlukan komitmen dari seluruh pihak, mulai dari pemerintah desa, masyarakat, hingga lembaga keagamaan, untuk

bersama-sama membangun sistem pemberdayaan ekonomi yang tidak hanya kuat secara struktural, tetapi juga bersih secara moral dan adil secara sosial. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip Islam dalam pengelolaan dana desa, maka cita-cita pembangunan yang berkah, berkelanjutan, dan mensejahterakan dapat benar-benar terwujud di tingkat desa.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa program alokasi dana desa di Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus memiliki potensi besar dalam memberdayakan ekonomi masyarakat jika dikelola secara efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Program ini telah mendorong terciptanya usaha mikro, peningkatan pendapatan warga, dan penguatan kelembagaan ekonomi desa, meskipun masih terdapat tantangan dalam hal partisipasi masyarakat, akuntabilitas pengelolaan, dan kesinambungan program. Dalam perspektif ekonomi Islam, keberhasilan suatu program pemberdayaan tidak hanya diukur dari aspek material, tetapi juga dari nilai-nilai keadilan, amanah, transparansi, dan kemaslahatan umum. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas program dana desa secara berkelanjutan, diperlukan penguatan literasi ekonomi Islam, peningkatan kapasitas aparatur desa, serta pelibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program, agar dana desa benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang adil, beretika, dan membawa keberkahan bagi seluruh warga desa.

Referensi

- Ardha, V., & Ismail, A. H. (2024). Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Menurut Perspektif Manajemen Keuangan Syariah. *EKSISBANK (Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan)*, 8(2), 223–237.
- Darwis, V., & Rusastra, I. W. (2011). Optimalisasi pemberdayaan masyarakat desa melalui sinergi program puap dengan desa mandiri pangan. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 9(2), 125–142.
- Ekasari, R. (2020). *Model Efektivitas Dana Desa untuk Menilai Kinerja Desa Melalui Pemberdayaan Ekonomi*. AE Publishing.
- Jaelani, A. (2016). *Agama, ekonomi dan negara: Pemikiran ekonomi al-Mawardi pada Adab al-Dunya wa al-Din*.

- Margayaningsih, D. I. (2016). Pemberdayaan Masyarakat Desa Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan. *Publiciana*, 9(1), 158–190.
- Saggaf, S., Said, M. M., & Saggaf, W. S. (2018). *Reformasi Pelayanan Publik di Negara Berkembang* (Vol. 1). Sah Media.
- Saripudin, U. (2021). *Rancang Bangun Model Pemberdayaan Ekonomi Petani Berbasis Ziswaf*. Penerbit Widina.
- Seto, A. A., Guruddin, S. R., Baroroh, H., Hehanussa, U. K., & Lestari, A. G. (2023). *Ekonomi Syariah Di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Sugianti, S., Ferawati, R., & Hafiz, A. P. (2019). *Peran usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam mensejahterakan karyawan di pusat oleh-oleh mak denok desa Serdang Jaya Kabupaten Tanjung Jabung Barat*. UIN Sulthan Thaha Saifuddin.
- Sugiyono, D. (2010). *Memahami penelitian kualitatif*.
- Tamsir, M., Ardiansah, A., & Kadaryanto, B. (n.d.). PENGAWASAN KEUANGAN DESA DALAM KONTEKS ISLAM DAN OTONOMI LOKAL: Studi di Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. *Nusantara; Journal for Southeast Asian Islamic Studies*, 21(1), 1–11.
- USWATUN, H. (2024). *ANALISIS PERAN DANA DESA MELALUI PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR GUNA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pekon Penyandingan Kecamatan Bangkumat Kabupaten Pesisir Barat)*. UIN Raden Intan Lampung.
- YANTI, F. I. (2019). *PERAN BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) PESANTREN DALAM UPAYA MENERAPKAN TRANSAKSI BERBASIS SYARIAH PADA MASYARAKAT (Studi Pada KSPPS BMT Assa'adah Santri Mandiri Pondok Pesantren Darussa'adah Mojo Agung Kecamatan Gunung Sugih Lampung Tengah)*. UIN Raden Intan Lampung.